



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : KPK Bakal Panggil Mendag Terkait Kasus Bowo  
**Tanggal** : Rabu, 24 April 2019  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 6

## KPK Bakal Panggil Mendag Terkait Kasus Bowo

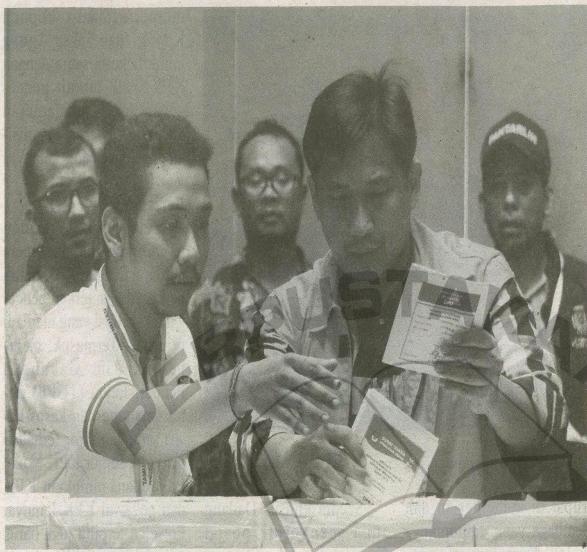
[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil dan memeriksa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi keterangan Bowo Sidik yang mengaku mendapat uang sekitar Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Singapura dari Enggar.

"Biasanya kalau disebutin pasti kan ditanya juga ke-mudian seperti apa penyidik bisa mengembangkan," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang seusai diskusi 'Catatan dan Rekomendasi Agenda Penguantan Pemberantasan Korupsi kepada Calon Terpilih' di Jakarta, Senin (22/4).

Saut mengatakan, keterangan Bowo harus didalam lebih jauh. Dari pendalamannya tersebut baru akan ditentukan langkah selanjutnya.

"Iya nanti kan kita lihat dulu disebut itu, seperti apa kita mendalaminya. Nanti kan menjadi catatan bagaimana penyidik mengembangkannya," kata Saut.

Hal ini penting lantaran dalam penanganan perkara yang dilakukan KPK, tersangka korupsi kerap menyebut nama pihak-pihak lain saat diperiksa penyidik.



ANTARA/RIVIAN AWAL LINGGA

Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso (kanan) memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilihnya di TPS 012 Guntur, Jakarta, Rabu (17/4). Sebanyak 63 tahunan KPK menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2019.

Namun, nama-nama tersebut belum tentu dapat ditindaklanjuti karena keterangannya bersifat tunggal atau tidak didukung lagi oleh bukti-bukti lainnya.

Untuk itu, kata Saut, KPK harus mendalami setiap keterangan tersangka secara hati-hati. Apalagi, suap dan gratifikasi yang diterima Bowo diduga bakal digunakan untuk serangan fajar Pemilu 2019 yang terkait erat dengan UU Pemilu.

"Karena begini kalau kita bicara penyidikan kan

nanti di situ akan dilihat peran orang perorong sebagai apa. Apakah dia bisa masuk di dalam kasus itu kan itu yang mau dicari kalau disebut-sebut juga tidak terkait dengan kasus itu. kemudian dalam kaitan namanya dana-dana pelaksanaan organisasi partai politiknya atau kontestasi itu kan bicara undang-undang Pemilu juga kan berapa boleh sumbang dan seterusnya. Jadi KPK harus hati-hati," kata Saut.

Diketahui, sejumlah media mewartakan bahwa ada pemberian sekira Rp 2 miliar-

ar dari Mendag ke Bowo yang diduga terkait pengamanan Peraturan Mendag soal gula kristal rafinasi.

### Pelajari

Saut mengatakan, pihaknya harus mempelajari dengan cermat setiap informasi yang mencuat, termasuk adanya dugaan kepentingan dalam pemberian uang ke Bowo tersebut.

"Ya nanti kita lihat apakah itu korupsinya atau *conflict of interest* nya atau yang lain nanti kita pelajari dulu," katanya.

### Dugaan Keterlibatan PT Pupuk Indonesia Didalami

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap kerjasama distribusi pupuk yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Tak hanya orang perorong, KPK juga mendalami adanya keterlibatan korporasi dalam kasus ini, termasuk PT Pupuk Indonesia.

Diketahui, Bowo Sidik bersama anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti. Suap ini diberikan lantaran Bowo membantu PT Humpuss Transportasi Kimia mendapatkan kembali kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk mendistribusikan pupuk PT Pupuk Indonesia.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui pihaknya telah mendalami peran Pupuk Indonesia sejak gelar perkara kasus ini usai menangkap Bowo dan sejumlah pihak lain beberapa waktu lalu. Pimpinan telah meminta timnya menelisik peran korporasi dalam memuluskan kontrak kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia tersebut.

"Penyidik akan mendalaminya, karena waktu ekspose kasus tersebut selesai OTT memang ada pertanyaan ke pada para penyelidik tentang hal itu," kata Saut saat dikonfirmasi, Selasa (23/4). [F-5]

Uang yang diberikan Enggar tersebut diduga bagian dari uang Rp 8 miliar suap dan gratifikasi yang diterima Bowo dari sejumlah pihak termasuk suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia terkait kerja sama pengangkutan pupuk PT Pupuk Indonesia. Saat disita penyidik KPK, uang Rp 8 miliar itu telah dipecah Bowo menjadi Rp 20.000 dan Rp 50.000 itu dimasukkan dalam 400.000 amplop dengan 82 kardus dan dua boks kontainer. Diduga ratusan ribu amplop tersebut disiapkan Bowo untuk serangan fajar pada Pemilu 2019. [F-5]